

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

SALMAN ALFARISI H

2009/13080

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)**

Oleh :

SALMAN ALFARISI H

2009/13080

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Januari 2015

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19781204 200801 2 011

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Salman Alfarisi H

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : alfarezisalman7@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine: (1) Effect of local tax on the financial performance of local governments, (2) Effect of local levies on the financial performance of local governments (3) Effect of Fund Balance to the financial performance of local governments.

The population in this study are all Local Government Barat. Sampel Sumatra province in this study amounted to 19 districts / cities. Data collection method used is by using a questionnaire. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 22.

The results showed that: (1) Local taxes significantly positive effect on the financial performance of local governments. High local tax revenue showed good financial performance of government, (2) local levies significant positive effect on the financial performance of local governments. Higher revenue, which shows the government's financial performance was good though not significant, (3) the balance of the Fund significant negative effect on the financial performance of local governments. Funds received high balance showed a high degree of dependence of local governments to the central government in financing and managing the area, so it can be said the government's financial performance is not optimal.

Keywords: local tax, local levies, Fund Balance , and the financial performance of local governments,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah , (2) Pengaruh Retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (3) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat. Sampel pada penelitian ini berjumlah 19 Kabupaten/kota. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik, (2) Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik meski tidak terlalu signifikan, (3) Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan dana perimbangan yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai dan mengelola daerah, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah belum optimal.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Dana Perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Perubahan tidak terjadi di pusat tetapi juga di daerah. Setelah era reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Akibat dari adanya otonomi daerah dituntutnya pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan (Florida:2007)

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut kinerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah. Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio. Salah satunya menggunakan tingkat desentralisasi fiskal, yaitu pendapatan daerah per total penerimaan daerah, atau menggunakan rasio kemandirian, yaitu total pendapatan asli daerah per total bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Menurut Yani (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Rahim (2008) juga menyebutkan bahwa dana perimbangan

yang diterima melalui DAU dan DAK tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, atau berdampak signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa usaha, dan (3) Retribusi Perizinan. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang paling besar ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya pajak daerah, apabila retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Sedangkan menurut Djaenuri (2012), pengertian mengenai dana perimbangan adalah dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas Dana bagi hasil, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012).

Pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang sesuai data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang (DPKA) dari tahun 2008-2012 cenderung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang belum stabil dan belum menunjukkan kinerja yang baik.

Dana Bagi Hasil Kota Padang pada periode tahun anggaran 2006 – 2011 sesuai data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, memiliki rasio 6.12% terhadap pendapatan daerahnya. Rasio terendah dimiliki oleh Kabupaten Padang

Pariaman, yakni sebesar 3.45% dan yang tertinggi berada di Kabupaten Solok Selatan, yaitu sebesar 7.43%. Karena masih rendah atau belum stabilnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan dana perimbangan yang berasal dari pusat. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki rasio diatas 50% yang artinya lebih dari setengah pendapatan daerah diperoleh melalui DAU. Kapasitas fiskal yang rendah menyebabkan penerimaan DAU yang tinggi. Karena perhitungan DAU didapat dari kebutuhan fiskal dikurangi terhadap kapasitas fiskal. Untuk DAK sendiri, khususnya pada data terbaru untuk tahun 2012 menunjukkan kontribusi sebesar 32.50 miliar atau sekitar 2.84% dari dana perimbangan.

Wan (2013) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menghasilkan kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial, pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, berbeda dengan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menspesifikasikan PAD hanya pada pajak daerah dan retribusi daerah. karena pada dua variabel ini banyak ditemukan adanya masalah dalam implikasinya dalam pemerintahan. Selain itu studi empiris penelitian ini berada di seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Barat. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, serta perbedaan hasil yang diperoleh beberapa penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat."**

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan adalah:

1. Pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan peran pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Masyarakat, sebagai bentuk informasi berapa nilai pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta hubungannya dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis sekaligus memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

a) Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi dalam Deddi dan Ayuningtyas (2011), secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan. Lalu masih menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik.

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu organisasi (Erlina, 2008). Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya

untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

b) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak

(yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak (Siahaan, 2103).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

c) **Retribusi Daerah**

Menurut Saragih (2003), retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Halim (2004). Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan,
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP,

4. Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil,
5. Retribusi pelayanan pemakaman,
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat,
7. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,
8. Retribusi pelayanan pasar,
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
12. Retribusi pengujian kapal perikanan,
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
14. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
16. Retribusi jasa usaha terminal,
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
21. Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal,
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,
24. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
25. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
26. Retribusi izin mendirikan bangunan,
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
28. Retribusi izin gangguan,
29. Retribusi izin trayek.

d) **Dana Perimbangan**

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi

daerahnya, maka dana transfer ke daerahnya dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Suparmoko, 2011). Pada Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan antar – pemerintah daerah.

Dalam Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.” Sedangkan menurut Djaenuri (2012), pengertian mengenai dana perimbangan adalah: “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.”

Pada Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana bagi hasil.
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus

Penelitian Terdahulu

1. Wan (2013) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Variabel penelitian tersebut adalah pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial, pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, berbeda dengan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Penelitian Halleina (2013) menjelaskan tentang pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah Kota Cimahi tahun 2008-2011.
3. Wenny(2012) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Penelitian Florida (2007) tentang pengaruh pendapatan asli daerah

terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa komponen PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Penelitian Tumangger (2014) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan pada pemerintah provinsi seluruh Indonesia menyimpulkan bahwa secara simultan semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, pajak daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hubungan antar variabel

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan sumber-sumber kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya (Wenny, 2012). Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian Florida (2007) mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti Pajak Hotel, Hiburan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber kekuatan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya. Sehingga dapat dijelaskan semakin tinggi pajak daerah, maka kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Dari hasil penelitian Florida (2007) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sama seperti pajak daerah yang memiliki banyak karakteristik, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah kota/kabupaten, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi persentase retribusi daerah suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah suatu daerah.

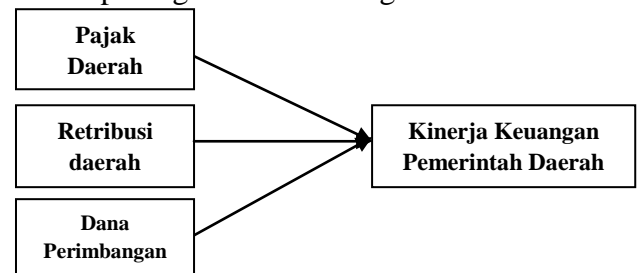
3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012).

Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini jelas menunjukkan kinerja fiskal suatu daerah. Khususnya bagi DAU dan DAK, jika persentase suatu daerah dalam penerimaan ke dua dana tersebut tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa celah fiskal / kapasitas fiskal daerah tersebut rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut baik.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Dari pajak tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Yaitu, pertumbuhan penerimaan, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak. Dalam penelitian ini akan diteliti sejauhmana pengaruh yang signifikan pertumbuhan penerimaan, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah kota Padang. Dilihat dari ketiga faktor yang mempengaruhi PAD tersebut, yaitu pertumbuhan penerimaan, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak, secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H₁: Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- H₂: Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- H₃: Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh struktur Pajak daerah, Retribusi daerah dan dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sampel

Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19, berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data ini adalah data sekunder yaitu data Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan hasil studi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.
- b. Berdasarkan waktu, data penelitian ini adalah pooling gabungan antara data silang (cross section) dan data runtut waktu (time series). Data time series yang digunakan yaitu data time series tahunan dari tahun 2008-2012. Sedangkan data cross section yang digunakan adalah 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan demikian, data pooling tersebut menghasilkan 95 observasi.

- c. Berdasarkan sifat, data yang digunakan adalah data kuantitatif karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan permasalahan yang diinginkan, maka dibutuhkan data yang akurat, karena jika data yang digunakan tidak memenuhi syarat, maka analisis yang akan dilakukan akan menjadi salah dan akan berakibat pengambilan data akan menjadi tidak cepat. Cara yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dan BPS Sumatera Barat.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pengukuran variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan tingkat desentralisasi fiskal, yaitu :

$$\text{Tingkat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Variabel Bebas (X)

Variabel Bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan

Teknis Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam

mempengaruhi variabel terikat. Sebelum melakukan analisis regresi, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang diperoleh dilapangan.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov (KS)* dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ dimana:

- a. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal
- b. Jika $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan. Menurut Idris (2006) multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas tersebut, maka salah satu diantaranya dieliminir (dikeluarkan) dari model regresi berganda atau menambah variabel bebasnya. Adanya gejala multikolinearitas

dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *Variance Infation Factor (VIF)*. Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* $< 0,1$ atau $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila *tolerance value* $> 0,1$ atau $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*. Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2007), model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), masalah autokorelasi diuji dengan Durbin-Watson dengan rumus (Gujarati : 2003) :

Tabel 1. Ketentuan Nilai Durbin-Watson (lampiran)

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebas lebih dari satu dan merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

α_0 : Konstanta
 X_1 : Pajak Daerah
 X_2 : Retribusi Daerah
 X_3 : Dana Perimbangan
 β_{1234} : Koefisien regresi
 ϵ : *Error Term*

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dari regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $\text{sig} < 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $\text{sig} > 0,05$, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) 0,05.

Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghozali (2006). Pengujian ini dilakukan dengan melihat probabilitas uji t pada tabel *coefficient significant* pada output tabel Anova yang dihasilkan dengan bantuan program aplikasi SPSS dimana: jika probabilitas (p value) < 0.05, maka hipotesis nol ditolak sebaliknya hipotesis alternatif yang diajukan ini dapat diterima, (koefisien regresi signifikan) pada tingkat signifikansi 5%. Adapun langkah-langkah dalam pengujiannya antara lain sebagai berikut:

Menentukan formulasi Ho dan Ha

Ho : $\beta = 0$ (tidak ada pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen)

Ha : $\beta \neq 0$ (terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen)

Level of significant $\alpha = 0.05$

$$t = \frac{\beta n}{S\beta n}$$

Keterangan:

βn = Koefisien regresi masing-masing variabel

$S\beta n$ = Standar *error* dari masing-masing variabel

Hasil pengujian terhadap *t*-statistik dengan standar signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah:

- Ho diterima jika $\text{Sig} \geq 0.05$ maka Ha ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- Ha diterima jika $\text{Sig} < 0.05$, maka Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Definisi Operasional

1. Pajak Daerah (X1)

Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Besarnya Pajak Daerah dapat dilihat dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah.

2. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah untuk tingkat Provinsi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Besarnya Retribusi Daerah dapat dilihat dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah.

3. Dana Perimbangan (X3)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Besarnya Dana Perimbangan dapat dilihat dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Dana Perimbangan.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam

batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum

Gambaran Umum Objek Penelitian

Wilayah Sumatera Barat terletak antara 0° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan. Serta 98° dan 101° Bujur Timur. Daerah Sumatera Barat merupakan wilayah berbentuk daratan dan kepulauan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara pada bagian utaranya. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 4.229.730 ha. Setara dengan 2.17 % dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan luas perairan laut diperkirakan 186.500 km² dan panjang garis pantai 2.420.57 km. Sebelum tahun 1999 kabupaten dan kota di Sumatera Barat berjumlah 14, kemudian pada tahun 1999 Kepulauan Mentawai dimekarkan dari Padang Pariaman. Selanjutnya pada tahun 2002 Kota Pariaman dimekarkan dari Padang Pariaman. Terakhir pada tahun 2003 tiga daerah melakukan pemekaran yaitu Dharmasraya sebagai pemekaran dari Sawahlunto Sijunjung, Solok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Dengan demikian kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat berjumlah 19 kabupaten dan kota.

Statistik Deskriptif

Untuk lebih mempermudah dalam melihat gambaran mengenai variabel yang diteliti dan setelah melalui proses pengolahan dengan menggunakan program SPSS, variabel tersebut dapat dijelaskan secara statistik seperti yang tergambar pada

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (lampiran).

Penelitian (lampiran). Dari tabel 2 terlihat bahwa hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini ada 95. Dari 95 observasi ini nilai Variabel (Y) memiliki rata-rata sebesar Rp515.456.243.209 dengan standar deviasi Rp212.338.796.912. Variabel (X1) diprosikan memiliki rata-rata sebesar Rp9.163.691.361 dengan standar deviasi Rp20.388.275.732. Persentase variabel (X1) tertinggi (maksimum) adalah Rp128.595.100.673, sedangkan persentase terendah (minimum) adalah 0. Variabel (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp7.096.140.605 dengan standar deviasi sebesar Rp5.967.789.998. Persentase variabel (X2) tertinggi (maksimum) terjadi pada angka Rp30.325.980.534 dan persentase terendah (minimum) pada angka 0. Variabel (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp416.959.741.061 dengan standar deviasi sebesar Rp159.202.167.321. Persentase variable (X3) tertinggi (maksimum) terjadi pada angka Rp1.044.585.806.623 dan persentase terendah (minimum) pada angka Rp19.355.273.000.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas reidual data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov smirnov test*. Jika tingkat signifikansinya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Jika tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada **Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (lampiran)**.

Pada hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1.120 dan signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,102 > 0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinearitas, maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hasil pengujian asumsi multikolinearitas untuk variabel penelitian ini dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai Tolerancenya. **Tabel . Hasil Uji Multikolinearitas (lampiran)**

Hasil Uji Multikolinearitas (lampiran) VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 . Hasil perhitungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan pada tabel 14 menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya dan objektif.

Uji Heterokedasitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila nilai sig $> 0,05$ maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas **Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (lampiran)**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig $> \alpha 0,05$ yaitu 0,208 untuk Pajak Daerah, 0,142 untuk Retribusi Daerah, dan

0,891 untuk Dana Perimbangan. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan **Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (lampiran)** ditemukan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,725 berada pada kisaran 1,55 – 2,46 yang berarti bahwa variabel terbebas dari autokorelasi.

Uji F Model

Dari **Tabel 7. Hasil Uji F** terlihat bahwa nilai sebesar 52,460 dan nilai *sig* sebesar 0,00. Dengan menggunakan tingkat α (alfa) 0,05 atau 5%, Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara simultan (bersama-sama) variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik dan untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Kriteria pengujiannya adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < 0,05$. Apabila telah memenuhi kriteria maka model dapat digunakan. Dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai $sig (0,00) < \alpha$ (alfa) = 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($52,460 > 2,704703$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) signifikan dan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan atau model sudah *fix*.

Uji Adjust R Determinan

Berdasarkan **Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)** dapat diketahui nilai adjusted R2 sebesar 0,662. Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 66,2% sedangkan 33,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Regresi berganda

Berdasarkan **Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda (lampiran)**, uji statistik regresi yang telah dilakukan dapat dirumuskan persamaan matematis dari penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = 182.513,140 + 25,474X_{1it} + 0,606X_{2it} - 0,0000113X_{3it} + U_{it}$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 182.513,140. Hal ini berarti bahwa jika variabel-variabel independen tidak ada, maka besarnya kinerja adalah sebesar 182.513,140.

b. Koefisien Regresi (β) X_1

Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 25,474. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pajak Daerah akan mengakibatkan Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 25,474.

c. Koefisien Regresi (β) X_2

Nilai koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,606. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Retribusi Daerah akan mengakibatkan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah sebesar 0,606.

d. Koefisien Regresi (β) X_3

Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X_3) sebesar -0,0000113. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dana Perimbangan akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,0000113.

Pengujian Hipotesis

Uji *t* dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji *t* dilakukan dengan membandingkan antara nilai *t* yang dihasilkan dari perhitungan statistik dengan nilai *t* tabel. Untuk mengetahui nilai *t* hitung dapat dilihat melalui tabel 9

hasil uji regresi berganda. Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 9, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel 9 memiliki nilai t_{hitung} sebesar $4,081 > t_{tabel} 1,98525$ dan nilai sig sebesar $0,000$. Nilai sig ($0,000$) $<$ ($0,05$) dengan nilai positif pada angka $25,474$, ini berarti variabel Pajak Daerah signifikan dan positif pada level 5% dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. **Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.**
2. Hipotesis Kedua penelitian ini adalah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel 9 memiliki nilai t sebesar $7,690$ dan nilai sig $0,000$. Nilai t_{hitung} sebesar $7,690 > t_{tabel} 1,98525$ dan nilai sig ($0,000$) $<$ ($0,05$), dengan nilai positif pada angka $0,606$. ini berarti variabel Retribusi daerah signifikan dan positif pada level 5% dan H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat. **Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.**
3. Hipotesis ketiga penelitian ini adalah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap keuangan pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel 9 memiliki nilai t sebesar $1,994$ dan nilai sig . $0,041$. t_{hitung} sebesar $1,994 < t_{tabel} 1,98525$ dan nilai sig ($0,041$) $<$ ($0,05$), dengan nilai negatif pada angka $0,0000113$. ini berarti bahwa variabel Dana Perimbangan signifikan pada level 5% dan H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat. **Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.**

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah diterima. Didalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan pajak daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wan Vidi Rukmana (2013) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Riduansyah (2013) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah memegang peranan penting dalam APBD. Penelitian Mastrianawati (2014) menyimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

daerah. Hal ini menunjukkan baiknya kinerja keuangan suatu daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri ditunjukkan dengan perbandingan total PAD yang meliputi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah. Apabila total penerimaan daerah sebagian besar berasal dari PAD maka kinerja keuangan pemerintah dapat dikatakan baik dalam mengoptimalkan pendapatan. Jika sebaliknya, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah belum baik atau belum optimal.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Didalam penelitian ini menunjukkan peningkatan pendapatan retribusi daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan H0 ditolak, ini menunjukkan secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Florida (2007) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut Yani (2012), secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan sendiri menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik. Penelitian Fachiroh (2009) menyimpulkan bahwa peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah juga mutlak akan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang otomatis akan mendongkrak kinerja keuangan daerah. Mastrianawati (2014) juga menyimpulkan bahwa

Retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun hasilnya tidak signifikan bukan berarti bahwa pemerintah dapat mengabaikan retribusi daerah. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan mencermati dan menggali sumber-sumber retribusi daerah yang memiliki potensi yang besar namun belum dioptimalkan dengan baik dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi $0,041 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X3 bernilai Negatif yaitu sebesar 0,0000113. Jadi hipotesis sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 diterima atau dengan kata lain hipotesis yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Tumangger (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah objek dan periode penelitian. Didalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi dana perimbangan, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal. Penelitian Hartono (2013) juga menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kusnandar (2011) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dana perimbangan khususnya dana alokasi umum

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini terjadi karena masih banyak daerah yang masih bergantung sebagian besar keuangan daerahnya kepada pemerintah pusat. Penelitian Yunanto (2013) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH dan DAU dikategorikan sebagai block grant yaitu kewenangan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan PAD, DBH dan DAU untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Nilai koefisien dana perimbangan sebesar $-0,0000113$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan sebesar Rp. 1 akan diikuti penurunan kinerja sebesar Rp. $-0,0000113$ dengan asumsi variabel lain tetap. Arah negatif ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

3. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menguji sebagian dari komponen PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor politik yang mungkin juga mempengaruhi penelitian ini.
3. Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga belum dapat mewakili seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah terutama pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri. Semakin meningkat penerimaan asli daerah tentunya akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Selain itu, pemerintah juga harus terus berupaya mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya dan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah periode pengamatan, menambah beberapa variabel dari PAD lainnya agar lebih mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan

dalam penelitian ini, oleh sebab itu diperlukan penelitian lain dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kurun waktu yang lebih besar. Agar penelitian ini lebih jelas dan lebih lengkap, sebaiknya penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Kedua. Universitas Sumatera Utara.
- Fachiroh, Rini. 2009. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Florida, Asha. 2007. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul Dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Halleina Rejeki Putri. 2013. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Pasundan
- Julitawati, Ebit. Darwanis. Jalaludin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Tesis. Universitas Syiah Kuala.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Kusnandar. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Indonesia
- Mastrianawati, Komang Hendri. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nordiawan, Deddi Dan Ayuningtyas, Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Pabundu, Mohammad. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahim, S. 2008. Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3206701711.pdf
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap*

- Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Depok. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.* Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sidik, Machfud. 2002. *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". *Skripsi.* STIA LAN Bandung.
- Tumangger, Herli Rosdiani. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* Skripsi. UNIMED.
- Wenny, CD. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.* Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2. Pp. 39-51
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yani, Ulpah. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN

Tabel 1
Klasifikasi Nilai d (D-W)

Nilai	Keterangan
$0 < dw < dl$	Ada autokorelasi
$dl \leq dw \leq du$	Tidak ada kesimpulan
$4 - dl < dw < 4$	Ada autokorelasi
$4 - du \leq dw \leq 4 - dl$	Tidak ada kesimpulan
$du < dw < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi

Tabel 2 . STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Pemerintah Daerah	95	Rp259.142.118.000	Rp1.475.988.121.519	Rp515.456.243.209	Rp212.338.796.912
Pajak daerah	95	Rp0	Rp128.595.100.673	Rp9.163.691.361	Rp20.388.275.732
Retribusi Daerah	95	Rp0	Rp30.325.980.534	Rp7.096.140.605	Rp5.967.789.998
Dana Perimbangan	95	Rp19.355.273.000	Rp1.044.585.806.623	Rp416.959.741.061	Rp159.202.167.321
Valid N (listwise)	95				

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	95
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	,0000000
Std. Deviation	80309,77263800
Most Extreme Differences	
Absolute Positive	,125
Negative	-,121
Kolmogorov-Smirnov Z	1,220
Asymp. Sig. (2-tailed)	,102

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak daerah	,603	1,659
Retribusi Daerah	,835	1,197
Dana Perimbangan	,673	1,486

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-11041,373	21149,501		-,522	,603
Pajak daerah	-5,127	4,041	-,155	-1,269	,208
Retribusi Daerah	220	,051	,498	4,306	,142
Dana Perimbangan	-,537E-07	,000	-,014	-,138	,891

a. Dependent Variable: Res_2

Tabel 6. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,796 ^a	,634	,622	81622,826	1,725

- a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Pajak daerah
 b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

ANALISIS REGRESI BERGANDA
Tabel 7. Uji F-Statistik
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.048.507.757.813	3	349.502.585.938	52,460	,000 ^b
Residual	606.268.000.630	91	6.662.285.721		
Total	1.654.775.758.443	94			

- a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
 b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Pajak daerah

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,796 ^a	,634	,622	81622,826

- a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Pajak daerah
 b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel. 9 Uji t-Statistik
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	182.513,140	32.667,437		5,587	,000
Pajak daerah	25,474	6,242	,334	4,081	,000
Retribusi Daerah	,606	,079	,595	7,690	,000
Dana Perimbangan	-0,0000113	,000	-,130	-1,994	,041

- a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah